

**BAB III**  
**LATAR BELAKANG DAN PROSES TERJADINYA KUDETA MILITER**  
**DI REPUBLIK FIJI TAHUN 1987**

Peristiwa yang mengganggu sistem pertahanan barat di kawasan Pasifik Selatan ini adalah kebijakan-kebijakan Perancis di kawasan ini. Perancis adalah satu-satunya negara Barat yang masih menggunakan wilayah Pasifik Selatan sebagai pangkalan ujicoba senjata nuklir, dan satu-satunya negara yang masih menunda proses dekolonisasi di Pasifik Selatan, terutama masalah dekolonisasi di Kaledonia Baru. Kedua hal ini sangat ditentang oleh negara-negara merdeka di Pasifik Selatan, termasuk Australia dan Selandia Baru, yang tergabung dalam Forum Pasifik Selatan. Peristiwa lainnya yang menambah kekacauan situasi di Pasifik Selatan adalah kudeta militer di Fiji pada Mei dan September 1987.<sup>1</sup>

**A. Latar Belakang Terjadinya Kudeta Fiji**

Kudeta yang terjadi di Fiji tentu saja dilatar belakangi oleh berbagai hal. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kudeta di Fiji tahun 1987 adalah sebagai berikut ini:

**1. Masyarakat Rasial di Fiji**

Penduduk Fiji terdiri atas 50% India, 46% bumiputra Fiji dan 4% dari seluruh populasi, yang meliputi ras Eropa, Cina, setengah Eropa, dan Pasifik lainnya. Terbentuknya masyarakat rasial seperti ini merupakan akibat dari pertumbuhan industri gula, yang dibangun tahun 1872, yang merupakan faktor yang menentukan dalam transformasi Fiji. Dalam tujuh puluh tahun,

---

<sup>1</sup> Zulkifli Hamid, *Sistem Politik Australia*, Bandung: LIP-FISIP-UI/PT Remaja Rosdakarya, 1999, hlm. 411.

produksi gula per tahun meningkat 125.000 ton, tetapi peningkatan ini tidak ditunjang oleh buruh-buruh bumiputra. Temperamen bumiputra tidak cocok untuk berpacu dalam pekerjaan tetap yang dibutuhkan bagi penanaman tebu. Dan, karena mereka memiliki sumber penghasilan lain (dari penyewaan tanah), mereka tidak mengharapkan untuk bekerja di perkebunan dan penggilingan tebu milik orang kulit putih. Pada waktu itu, pemilik perkebunan mampu mencukupi kebutuhan akan buruh dengan mengimpor buruh dari Kepulauan Solomon dan New Habrides (sekarang Vanuatu). Penculikan budak untuk dijual, yang dikenal dengan *blackbird*, juga menyertai lalu lintas pengimporan buruh tersebut.

Saat itu kekacauan sering terjadi, sehubungan dengan meningkatnya ekonomi sehingga memerlukan suatu pemerintahan yang kuat untuk mengatasinya. Pelanggaran hukum yang dilakukan orang-orang kulit putih semakin menjadi-jadi. Selain itu peperangan antarsuku juga sering melibatkan orang-orang kulit putih. Oleh sebab itu, setelah menolak beberapa kali, pada akhirnya pemerintah Inggris menerima tawaran para kepala suku yang menyerahkan kekuasaan atas tanah Fiji kepada Inggris. Sebaliknya, Pemerintah Inggris harus menjamin kepentingan politik dan ekonomi bumiputra Fiji, dan mengakhiri peperangan antarsuku. Perjanjian ini ditandatangani oleh Kepala Suku Bau, Cakobau, dan beberapa kepala suku lainnya dalam Piagam Penyerahan *Deed of Cession* pada bulan Oktober 1874. Sejak itu pemerintah kolonial dibentuk di Fiji dan seiring

dengan itu maka semua buruh yang bekerja di perkebunan dan penggilingan tebu harus dikembalikan ke negeri asalnya.

Berdasarkan *Deed of Cession*, Gubernur Jenderal Fiji pertama, Sir Arthur Gordon, membuat langkah-langkah kebijaksanaan baru yang menjamin terlindungnya kepentingan bumiputra Fiji. Antara lain dengan pembentukan administrasi bumiputra Fiji yang merupakan suatu pemerintah lokal yang terpisah dari pemerintah kolonial. Dalam hal ini, Gubernur Jenderal berusaha untuk memberikan kesempatan bagi bumiputra untuk mengatur masalah-masalahnya sendiri. Untuk itu bumiputra dibagi dalam unit-unit administratif yang erat hubungannya dengan unit-unit politik tradisional. Di dalam unit politik itu bumiputra Fiji melaksanakan tanggung jawab sosial, ekonomi, dan politik menurut aturan tradisi. Seiring dengan itu dibentuk pula Dewan Kepala Suku, yang merupakan badan penasihat administrasi bumiputra Fiji (lembaga ini hidup hingga sekarang).<sup>2</sup>

Langkah lainnya ialah kebijaksanaan di dalam penyediaan buruh bagi kepentingan industri gula . Hal ini berkaitan erat dengan penciptaan masyarakat rasialis Fiji. Untuk menjaga kaum bumiputra dari eksploitasi pemilik kebun, dan didorong oleh keinginan untuk memulihkan masalah pengangguran di India, maka Gubernur Jenderal memutuskan bahwa buruh yang dibutuhkan untuk mengembangkan perekonomian haruslah dikontrak

---

<sup>2</sup> Zulkifli Hamid, *Politik di Fiji: Suatu Studi Pendahuluan, dalam Jurnal Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1989, hlm. 98-99.

dari India.<sup>3</sup> Melalui suatu perjanjian dengan Pemerintah India, Gubernur Jenderal Sir Arthur Gordon mendatangkan buruh dari India berdasarkan kontrak yang menjamin repatriasi setelah berakhirnya 10 tahun masa kontrak.

Sejak awal sampai berakhirnya system buruh kontrak (1879-1916), terdapat sekitar 60.537 orang India tiba di Fiji sebagai buruh kontrak. Di antara mereka yang bertolak dari Calcutta dan Madras, sekitar 85,3% beragama Hindu, 14,6% Islam, dan 0,1% Kristen. Mereka juga berasal dari kasta yang berbeda-beda, seperti Brahma, Ksatria, dan kasta rendah lainnya.

Dengan berakhirnya sistem buruh kontrak di tahun 1916, masyarakat rasial tercipta di Fiji. Sebagian besar buruh India memilih untuk tetap tinggal setelah menyelesaikan kontraknya. Sementara gelombang migrasi yang kecil, tetapi terus menerus, melipatgandakan jumlah mereka. Lima tahun setelah berakhirnya sistem itu, terdapat sekitar 61.000 orang India atau 39% dari jumlah seluruh penduduk Fiji. Tahun 1946 mereka membentuk bagian terbesar jumlah penduduk Fiji dan di dalam tahun 1866, jumlahnya lebih dari 51%.

Nasib mereka pun berubah. Mereka mendominasi perekonomian di Fiji. Beberapa memasuki dunia profesional, seperti pengacara, dokter, tetapi bagian terbesar adalah pengusaha, khususnya di bidang industri gula. Mereka juga mapan di bidang pelayanan seperti transportasi, jasa boga, penyewaan rumah, pegawai negeri, dan lain-lain.

---

<sup>3</sup> Robert K. Norton, *Race and Politics in Fiji*, Queensland: University of Queensland Press, 1997, hlm. 7.

Langkanya perkawinan antar bumiputra dan India memperkuat perbedaan di antara kelompok ini. Berbeda dengan kelompok India, pernikahan antara orang Eropa dan bumiputra Fiji sering terjadi, sehingga melahirkan ras setengah Eropa. Di segi lain tampak pula bahwa masing-masing kelompok memilih untuk berbicara dengan bahasa mereka sendiri. Dengan demikian rasa kesetiaan mereka terhadap negara lebih lemah daripada kesetiaan kepada ras dan agamanya. Persamaan masing-masing ras terhadap komunalnya lebih kuat daripada perasaan kebangsaannya.

Perbedaan semakin mengental karena hampir tidak adanya kerja sama di antara kelompok ras utama tersebut. Memang benar sebagian besar orang India dan bumiputra Fiji hidup di daerah pedesaan, namun mereka tinggal di kawasan yang sama sekali terpisah satu sama lainnya. Orang-orang India terutama hidup di sekitar perkebunan tebu dengan rumah-rumah tersendiri. Sedangkan kaum bumiputra tinggal secara bersama dalam beberapa rumah, yang merupakan satu kelompok *mataqali*, dan bercocok tanam yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, seperti menanam *taro* (semacam talas). Mereka sering bertemu satu sama lain, di pasar misalnya, namun mereka memilih untuk berbicara dalam bahasa ibu masing-masing.

Di kota-kota besar, seperti Suva misalnya, mereka pun sering bertemu di tempat kerja. Tidak dapat disangsikan bahwa kedua kelompok ras utama tersebut juga menduduki berbagai posisi sebagai pegawai negeri. Tetapi bahasa yang digunakan untuk berbicara sesama mereka adalah bahasa ibu masing-masing. Dan bila ada di antara kedua kelompok berbicara, maka

hanya bahasa Inggris yang dipergunakan. Kelemahannya adalah tidak semua bumiputra Fiji, terutama yang tinggal di pedesaan, mengerti bahasa Inggris, sementara keturunan India, walaupun tidak semuanya, relatif lebih mampu, berbahasa Inggris. Kelemahan lainnya ialah bahwa tempat tinggal kedua kelompok ras utama, yang hidup di daerah perkotaan, juga terpisah. Ada semacam daerah-daerah yang merupakan pemukiman orang India saja, dan bumiputra Fiji saja. Walaupun pola pemukiman yang demikian tidak pernah diatur, namun masing-masing kelompok suku seakan mengerti di mana mereka harus memilih tempat tinggal.<sup>4</sup>

## **2. Masalah Ras dan Perkembangan partai**

Penduduk Fiji, yang berjumlah sekitar 700.000 jiwa, merupakan masyarakat multirasial, yang terdiri dari 50% keturunan India, 43% anak negeri, dan 7% dari ras lain seperti Eropa, Cina, Polinesia, dan lain-lain.<sup>5</sup> Masyarakat rasial Fiji melahirkan beberapa persoalan di dalam pembentukan bangsa. Masalahnya ialah bagaimana orang-orang dari berbagai ras, kebiasaan dan tradisi, agama, serta bahasa dapat diikat dalam satu bangsa. Meskipun orang-orang keturunan India merasa bahwa Fiji adalah negaranya, namun mereka tetap memelihara adat dan tradisi dari negeri leluhurnya serta membentuk struktur sosialnya sendiri. Di lain pihak, bumiputra Fiji mempunyai tradisi dan adat sendiri, dan mereka merasa

---

<sup>4</sup> Zulkifli Hamid, (Jurnal Ilmu Politik) *op.cit.*, hlm. 99-101.

<sup>5</sup> Zulkifli Hamid, *Sistem Politik Pasifik Selatan*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1996, hlm. 109.

bahwa Fiji adalah tanah airnya sendiri, yang tidak diperintahkan oleh kaum imigran.<sup>6</sup>

Dalam kehidupan masyarakat terjadi pemisahan antara kaum anak negeri dan keturunan India. Dua partai politik utama yang muncul semenjak tahun 1960-an mewakili kepentingan masing-masing ras, NFP membawa kepentingan keturunan India dan Partai Aliansi mewakili anak negeri.<sup>7</sup> Partai Nasional Federasi (NFP) berdiri sebagai sekutu dari orang-orang keturunan India di Fiji. Beberapa aktivis pemogokan buruh pabrik gula di tahun 1960, A.D. Patel, Siddiq Koya, dan James Madavan, bersepakat untuk membentuk partai ini tahun 1964. Kalau mulanya bergerak di lingkungan buruh, partai ini meluaskan pengaruhnya dengan memajukan kepentingan keturunan India. Oleh sebab itu, NFP tidak hanya didukung oleh petani tebu saja, tetapi oleh sebagian besar keturunan India. Bahkan di tahun 1977, Partai ini menyuarakan prinsip bagi orang India dan pemikiran rasial semakin menutupi dasar-dasar ideology populis, dan menjadi pusat perhatiannya ialah apa yang mereka lihat sebagai kegagalan pemerintahan Aliansi untuk memperbaiki jaminannya bagi penyewa tanah keturunan India.

Partai ini sering dilanda persaingan di antara para tokohnya. Salah satu yang menonjol ialah yang terjadi sebelum pemilihan umum kedua tahun 1977. Dalam pemilu tersebut, kemudian, partai turun dengan dua

---

<sup>6</sup> Zulkifli Hamid, (Jurnal Ilmu Politik) *op.cit.*, hlm. 100.

<sup>7</sup> Zulkifli Hamid, (1996) *op.cit.*, hlm. 110.

tanda gambar yang berbeda, Bunga dan Merpati, dan melepaskan tanda gambar lamanya, yaitu Pohon Mangga. Hal ini menandakan bahwa terdapat dua faksi dalam partai itu yang sedang bertarung. Meskipun demikian, mayoritas penduduk keturunan India tetap memilih mereka daripada Aliansi.

Partai Aliansi juga dibentuk berdasarkan ras. Sejak kemerdekaan di tahun 1970, partai ini memerintah Fiji selama 17 tahun. Hanya pada pemilu tahun 1987 saja, partai ini dikalahkan oleh koalisi Partai Buruh Fiji (FLP) dan NFP, yang menjadikan Dr. Bavadra sebagai Perdana Menteri. Partai Aliansi dibentuk hanya lima bulan sebelum pemilu 1966. Partai ini menggabungkan kekuatan-kekuatan asosiasi bumiputra Fiji, Kongres Nasional, Asosiasi General *Elector*, Front Politik Muslim, Partai Minoritas Fiji (Islam), Asosiasi Keturunan Cina, Konvensi Rotuma, dan Asosiasi warga Tonga, untuk menghantam NFP. Kelompok utama dalam partai ini adalah asosiasi bumiputra Fiji dan merupakan tulang punggung partai.<sup>8</sup> Ketika penggabungan dilaksanakan, beberapa anggota asosiasi mendesak kelompok lainnya bahwa bumiputra akan menerima partai ini hanya bila ia bisa menjadi alat politik bagi asosiasi bumiputra. kelompok lainnya dalam gabungan ini bisa menerima desakan itu, sebab mereka kelompok minoritas di dalam partai yang mempunyai kepentingan sama. Oleh sebab itu, sampai sekarang ini anggota asosiasi bumiputra memainkan peranan penting dalam

---

<sup>8</sup> Anne Ahira. <http://www.anneahira.com/fiji.htm> diakses pada tanggal 20 Desember 2012



Aliansi. Partai ini, kemudian memilih Ratu Mara, ketua asosiasi bumiputra Fiji, sebagai presiden.

Partai lainnya yang dibentuk sepanjang garis rasial adalah Partai Nasionalis Fiji (FNP). Partai ini didirikan oleh Sakeasi Butradoka sebelum pemilu pertama tahun 1977, tepatnya bulan Oktober 1976. Kebijakan partai ini, pada dasarnya bersifat rasial, yaitu "Fiji untuk bumiputra Fiji". Butradoka sendiri sebenarnya dipilih dalam parlemen tahun 1972 sebagai anggota Aliansi, tetapi dipecat dari partai tahun 1974, karena dianggap melakukan tindakan rasial yang merugikan partai. Ia kemudian meningkatkan gerakannya dengan mengajukan mosi di parlemen bulan Oktober 1975 yang menyerukan repatriasi ke India bagi warganegara Fiji keturunan India. sumber lain mengatakan bahwa pemecatan Butradoka dari Aliansi ada kaitannya dengan tuduhan-tuduhannya kepada Perdana Menteri, ratu Sir Kamisese Mara. Ia membuat pernyataan secara terbuka bahwa lapangan udara dan instalasi listrik di desa tempat tinggal Perdana Menteri, Lakeda, di daerah Kepulauan Lau, dibangun atas biaya daerah-daerah lainnya.<sup>9</sup>

Di dalam pemilu pertama 1977, Butradoka berkampanye di radio dalam bahasa Fiji, dan menolak menerjemahkan ke dalam bahasa Hindi dan Inggris. Meskipun memperoleh satu kursi dalam parlemen dalam pemilu

---

<sup>9</sup> Asni Ovier DP. <http://groups.yahoo.com/group/gandi/message/433> diakses pada 22 Desember 2012

pertama tahun 1977, namun dukungan bumiputra kepada FNP turun drastis dalam pemilu kedua tahun 1977 dan gagal meraih kursi.<sup>10</sup>

Front Persatuan bagian Barat (WUF) sebenarnya dibentuk tidak berdasarkan ras. Partai ini hanya merupakan kelompok sempalan dalam komunitas bumiputra yang mengharapkan Pemerintah Aliansi memperhatikan kepentingan masyarakat yang hidup di bagian barat Viti Levu. Pimpinannya ialah seorang anggota parlemen independen, ratu Osea Gavidi. Kekecewaannya terhadap Aliansi menyebabkan ia mengadakan koalisi dengan NFP dalam pemilu 1982. Motivasi dari koalisi ini adalah jelas, yaitu menghancurkan kubu Aliansi. Akan tetapi, koalisi ini gagal meraih suara mayoritas.

Partai Buruh Fiji (FLP) adalah satu-satunya partai yang tidak didasarkan pada kepentingan ras. Partai ini didasarkan pada kelas, yaitu kelas pekerja, dan didirikan oleh beberapa tokoh yang mewakili bumiputra dan India. FLP dibentuk untuk memberikan alternatif politik bagi pemilih, yang telah dijejali oleh politik ras yang dikemukakan oleh, dan untuk kepentingan, elite. Dalam partai ini bergabung beberapa pimpinan NFP seperti H.M. Lodhia, dan Satendra Nandan, yang mengundurkan diri karena menganggap NFP, sebagai oposisi, kurang mempunyai kepercayaan diri dalam menghadapi pemerintah Aliansi. Walaupun Irene Jai Narayan, salah satu tokoh NFP lainnya, juga mengundurkan diri bersama mereka namun ia

---

<sup>10</sup> Asni Ovier DP. <http://groups.yahoo.com/group/gandi/message/433> diakses pada 22 Desember 2012

bergabung ke dalam Aliansi, dan sekarang menjadi Menteri Urusan Keturunan India dalam Republik Fiji.

Pihak-pihak lain yang bergabung dalam FLP ialah Kongres Serikat Buruh Fiji (FTUC-didominasi pemerintah Aliansi), Serikat Guru Fiji (FTA-organisasi guru keturunan India). Ketiga organisasi yang biasanya saling bertentangan ini, bisa meredakan ketegangan di antara mereka, karena mempunyai kepentingan yang sama. Mereka tidak puas terhadap beberapa kebijaksanaan pemerintah Partai Aliansi, seperti soal pengurangan sekolah umum dalam sistem terpisah, dan pembekuan gaji selama 1 tahun dari bulan November 1984. Setelah mengadakan beberapa kali pertemuan, maka pada akhirnya konperensi partai memilih Dr. Bavadra, bekas anggota aliansi sebagai presiden.

Meskipun secara prinsip, partai ini berdasarkan diri pada ideologi kelas, namun Bavadra menyadari bahwa perbedaan rasial dalam masyarakat harus diperitmbangkan. Oleh karena itu pada pemilu tahun 1987, FLP memasuki koalisi dengan NFP. Dengan memanfaatkan rasa tidak puas masyarakat terhadap kebijaksanaan Aliansi, dan soal bebas nuklir di Pasifik Selatan, yang merupakan tema kampanyenya, koalisi FLP-NFP dapat memenangkan suara mayoritas. Kemudian membentuk pemerintahan yang didominasi keturunan India, pimpinan Dr. Bavadra. Tetapi kekuasaanya tidak berlangsung lama karena Letkol Rabuka memimpin kudeta pada 4 Mei 1987 untuk menggulingkan kabinet.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Zulkifli Hamid, (Jurnal Ilmu Politik) op.cit., hlm.101-104.

Organisasi-organisasi sosial lainnya, seperti organisasi guru juga terpisah berdasarkan ras. Bahkan sekolah-sekolah dasar terbagi atas konfigurasi ras utama ini. Konstitusi yang berlaku di Fiji, baik konstitusi tahun 1966 maupun konstitusi tahun 1970, juga mencerminkan konfigurasi ras Fiji.<sup>12</sup>

Kesetiaan masing-masing individu kepada rasnya juga menciptakan masalah bagi pembentukan bangsa. Tanah bumiputra dimiliki oleh *mataqali*,<sup>13</sup> dan merupakan simbol kesetiaan dan komitmen terhadap puaknya, sebaliknya kegiatan bisnis India dimiliki oleh keluarga, dibangun melalui ikatan *kinship* yang semakin diperkuat karena adanya kemalangan.<sup>14</sup>

Selain minoritas dari segi kuantitas dan adanya persamaan hak diantara kedua ras utama, kaum anak negeri mempunyai keawatiran terhadap keturunan India. Apalagi secara ekonomi kaum anak negeri jauh tertinggal dibandingkan dengan keturunan India. Penduduk keturunan India menguasai perekonomian Fiji, dari industri gula yang merupakan devisa utama-sampai kepada industri jasa lainnya. Bidang-bidang profesi lainnya, seperti kedokteran, hukum, dan lainnya, juga diduduki oleh keturunan India.

<sup>12</sup> Zulkifli Hamid, (1996) , loc.cit.

<sup>13</sup> *Mataqali* adalah subklem dari garis keturunan pihak ayah yang terdiri dari beberapa keluarga luas. Setiap anak sejak lahir harus dicatat dalam *Mataqali*, sebab ini sebagian dasar dari sahnya seseorang untuk memiliki hak atas tanah bumiputra. Lihat: Asesela Ravuvu, *Vaka I Taukei: The Fijian Way of Life*, Suva: The University of South Pasific, 1983, hlm. 5.

<sup>14</sup> Agmed Ali, *Problems of Constitution-making in Fiji, dalam Fasific Perspectives, No. 4 (1/2), 1975, hlm. 76.*

Sedangkan kaum anak negeri hanya memiliki satu sumber ekonomi, yaitu tanah, yang tidak dapat diperjual belikan kecuali disewa. Oleh karena itu, kaum anak negeri nampaknya membutuhkan sesuatu untuk melindungi hak-haknya sebagai pemilik tanah di negerinya. Hal itu terpelihara semenjak pemerintah kolonial Inggris berkuasa di Fiji, dan dikukuhkan dalam konstitusi setelah Inggris memberikan kemerdekaan kepada masyarakat Fiji. Semenjak kemerdekaan tahun 1970, hak-hak anak negeri terjaga dengan baik, karena Partai Aliansi selalu memenangkan pemilu, yang berlangsung lima tahun sekali, sehingga kekuasaan politik senantiasa berada di tangan kaum anak negeri.

Kekawatiran itu terjadi ketika koalisi FLP-FNP pimpinan Bavadra memenangkan pemilu 1987. Sekalipun Bavadra adalah seorang anak negeri, namun ia menempatkan tujuh keturunan India, enam anak negeri, dan satu *general elector* dalam kabinetnya, yang kemudian disebut sebagai “kabinet yang didominasi keturunan India”. Selain itu tersebar isu yang menyatakan bahwa Kabinet Bavadra akan memperpanjang jangka waktu penyewaan tanah anak negeri sampai 75 tahun. Tak heran bahwa selama kampanye pemilu 1987, kalangan Partai Aliansi menyebut Bavadra sebagai “Boneka India”.<sup>15</sup>

### **3. Persoalan di Sekitar Konstitusi Fiji**

Pembentukan konstitusi, pertama kali, dimulai ketika Inggris memberikan status pemerintahan sendiri bagi Fiji di tahun 1966. Bulan Juli

---

<sup>15</sup> Zulkifli Hamid, (1996) *op.cit.*, hlm. 109-110.

1966, Inggris memanggil wakil-wakil bumiputra dan India untuk mengadakan Konferensi Konstitusi di London. Pihak bumiputra sendiri yang diwakili oleh Asosiasi Bumiputra Fiji, baru mau menghadiri sidang setelah mendapat jaminan bahwa soal kemerdekaan dan tanah bumiputra tidak masuk dalam agenda persidangan.

Dalam persidangan itu, pihak keturunan India yang diwakili oleh NFP, mendesak adanya suatu kemerdekaan bagi Fiji dan digunakannya sistem *common-roll* dalam pemilihan umum di Fiji. Penggunaan sistem demikian akan menjamin hak yang sama bagi seluruh warganegara, dimana setiap orang mempunyai satu suara yang dengan nilai yang sama, sesuai dengan prinsip demokrasi. Usulan ini sebenarnya telah lama dicita-citakan oleh keturunan India, yang mendasarkan tuntutanannya pada "Amanat Lord Salisbury" tahun 1895. Amanat itu menjanjikan bagi orang India, yang ketika itu masih menjadi buruh kontrak, suatu hak politik di negeri ini. tetapi berbagai pihak, termasuk pemerintah India, menolak isi amanat ini, dan menyatakan bahwa amanat itu adalah surat menyurat belaka dan bukan merupakan suatu dokumen resmi yang mengesahkan suatu kontrak.<sup>16</sup>

Di lain pihak, bumiputra menolak penggunaan *common-roll*, dan mendesak digunakannya sistem pemilihan komunal dengan alasan bahwa perbedaan ras adalah kenyataan yang tidak dapat dihindari sehingga konstitusi harus mengakuinya agar setiap kelompok ras memiliki suara dalam parlemen. Sebenarnya ada dua faktor yang menyebabkan bumiputra

---

<sup>16</sup> Agmed Ali, *Problems of Constitution-making in Fiji, dalam Pasific Perspectives, No. 4 (1/2), 1975, hlm.102*

menolak gagasan yang diutarakan oleh lawannya, NFP. Pertama, bahwa bumiputra menganggap keturunan India mempunyai radikal. Kedua, adanya rasa antipati terhadap orang-orang keturunan India. Ketiga, rasa antipati ini diperkuat dengan kecemburuan ekonomi. Kaum bumiputra menyadari bahwa keadaan ekonomi mereka jauh tertinggal dibandingkan dengan orang-orang keturunan India.

Dengan demikian penolakan atas usulan NFP itu sesungguhnya merupakan pencerminan dari rasa takut akan dominasi orang-orang keturunan India. Penggunaan *common-roll* jelas bisa membahayakan kepentingan bumiputra atas tanah milik mereka. Di luar kedua kelompok ini, pihak Eropa sendiri menghendaki hak-hak istimewa, yang telah dinikmati selama masa kolonial, tetap terjamin tanpa *common-roll*.

Untuk menghindari kemacetan-kemacetan dalam pembicaraan, Pemerintah Inggris memprakarsai penggunaan system pemilihan silang (*cross-voting*). Ini merupakan kompromi dari tuntutan yang diajukan oleh masing-masing kelompok. Konstitusi Fiji tahun 1966 mencerminkan pemisahan rasial dalam masyarakatnya. Dari 34 kursi di parlemen yang diperebutkan, 12 untuk bumiputra, 12 untuk keturunan India, dan 10 untuk *general elector* (Eropa, setengah Eropa, dan Cina). Selain itu terdapat tambahan 2 orang yang dipilih oleh Dewan Kepala Suku, dan maksimum 4 yang dicalonkan oleh Gubernur Jenderal. Sehingga jumlah maksimum anggota parlemen seluruhnya adalah 40 orang.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 117

Prinsip yang digunakan dalam pemilihan silang ialah bahwa setiap pemilih mempunyai empat suara. Satu suara untuk memilih calon wilayah komunalnya masing-masing dan satu suara untuk memilih calonnya di tiga wilayah pemilihan nasional (*cross-voting*). Daerah pemilihan komunal hanya mencakup daerah pemilihan masing-masing ras, sedangkan daerah pemilihan nasional meliputi semua ras.

Konstitusi tahun 1966 berlaku sampai kemerdekaan Fiji di tahun 1970 Bulan November 1968, sebagian anggota Aliansi berpendidikan universitas, yang dipimpin Ratu Kamisese Mara, secara persuasif, mengajak dewan kepala suku untuk mengesahkan suatu resolusi yang menyerukan diadakannya konperensi mengenai konstitusi. Berdasarkan resolusi itu dijadwalkan bahwa konperensi diadakan bulan Agustus 1969, dengan syarat bahwa anggota dewan perwakilan yang terpilih yang ikut dalam negosiasi. Disetujui pula, oleh kedua kelompok, bahwa hanya musyawarah dan mufakat, kalau memungkinkan, yang menentukan hasil pembicaraan.<sup>18</sup>

Di tengah-tengah berlangsungnya konperensi, A.D. Patel, pimpinan NFP yang paling berpengaruh, meninggal secara mendadak di bulan Oktober 1969. Sehingga pembicaraan harus dihentikan untuk sementara waktu dan dibuka kembali pada bulan November 1969. Partai Aliansi mengumumkan bahwa mereka menerima status dominion bagi Fiji, dan tetap mempertahankan prinsip-prinsip Konperensi London 1965. Sementara itu

---

<sup>18</sup> Shinta shinaga. <http://news.detik.com/read/2006/12/05/164353/716478/10/fiji-negeri--langganan--kudeta> diakses pada 24 Desember 2012



NFP, sepeninggal Patel masih dalam keadaan goncang, tetapi secara taktis menengguhkan *common-roll* untuk diperjuangkan dalam masa setelah kemerdekaan. Bagi NFP, yang terpenting adalah Inggris sudah meninggalkan Fiji.

Terdapat beberapa perubahan dalam konstitusi tahun 1970,. Tingkatan perwakilan memakai sistem dua majelis, Majelis Rendah dan Senat. jumlah kursi dalam Majelis Rendah terdiri atas 22 bumiputra, 22 India, dan 8 *general elector*. Prinsip yang digunakan dalam pemilihan umum juga tetap sama seperti Konstitusi 1966, yaitu pemilihan silang. Dipersyaratkan juga bahwa 27 dari 52 kursi dipilih berdasarkan pemilihan komunal, dan 25 kursi dipilih berdasarkan pemilihan nasional (*cross-voting*).

Keanggotaan dalam Senat diatur melalui suatu sistem pencalonan. Perinciannya ialah 8 dicalonkan oleh dewan kepala suku, 7 dicalonkan oleh perdana menteri, 6 dicalonkan oleh pimpinan oposisi, dan 1 dicalonkan oleh Dewan Kepulauan Rotuna.

Konstitusi Fiji tahun 1970 sering diinterpretasikan sebagai pemantapan terhadap kepentingan-kepentingan bumiputra. Penguraian komposisi rasial dalam parlemen sebenarnya mendukung pandangan bahwa bumiputra akan selalu berkuasa di negerinya. Bagian yang tak terpisahkan dari kedudukan istimewa bumiputra Fiji ialah bahwa konstitusi mengakui perlindungan atas tanah dan administrasi bumiputra. Konstitusi juga memberikan pencegahan bagi perubahan atas pasal-pasal yang Rancangan undang-undang yang menyangkut tanah, adat, dan kebiasaan bumiputra

tidak dapat disahkan kalau tidak diundang oleh 6 dari 8 anggota Senat yang dicalonkan dewan kepala suku.

Isu mengenai masalah perubahan konstitusi inilah yang dibangkitkan kembali oleh kaum bumiputra ketika koalisi FLP-NFP memenangkan pemilu tahun 1987. Ketika itu muncul desas-desus bahwa kabinet Dr. Bavadra akan mengusulkan perubahan pasal konstitusi mengenai tanah bumiputra. Di katakan bahwa Kabinet Dr. Bavadra, yang mayoritas keturunan India, akan memberikan hak kepada penyewa untuk membeli tanah bumiputra, dan atau sekurang-kurangnya memperpanjang sistem kontrak menjadi 30 tahun. meluasnya desas-desus ini menyebabkan kaum bumiputra yang mendukung Bavadra dalam pemilu April 1987, yang disebabkan oleh rasa tidak puas terhadap Pemerintahan Aliansi yang korup, berbalik menentangnya. Sementara itu tokoh Aliansi, Apisai Tora, menggunakan kesempatan ini untuk menyatukan aspirasi bumiputra. Tora dan beberapa tokoh Aliansi lainnya membentuk Gerakan *Taukei* (bumiputra). Gerakan yang bersifat race chauvinist, ini setiap hari mengadakan rapat umum di depan gedung parlemen, yang juga merupakan gedung pemerintahan, untuk menuntut Kabinet Bavadra agar menjamin kepentingan bumiputra. Oleh karena menghangatnya rapat-rapat umum inilah, Letkol. Rabuka mengadakan kudeta militer, yang dikatakannya untuk mendahului kekerasan bumiputra yang terjadi. Sementara Gerakan *Taukei* menjadi pendukung kuat bagi legitimasi kudeta militer tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Zulkifli Hamid, (Jurnal Ilmu Politik) *op.cit.*, hlm. 104-107.

#### 4. Masalah Perbedaan Agama

Masalah lainnya ialah perbedaan agama. orang-orang India beragama Hindu dan Islam, sedangkan bumiputra adalah penganut Kristen Metodis. Dari sudut pandang India, tanah hanyalah memiliki nilai ekonomis, sedangkan bumiputra, tanah mempunyai nilai sosial dan psikologis.<sup>20</sup>

#### B. Proses Terjadinya Kudeta Fiji

Kudeta militer di Fiji pada bulan Mei tahun 1987 telah memecah ketenangan di kawasan Pasifik Selatan. Peristiwa pengambilalihan kekuasaan secara tidak lazim ini, yang baru pertama kali terjadi di kawasan ini, dilakukan oleh Letnan Kolonel Sitiveni Rabuka, sekarang Mayor Jenderal. Pada hari Kamis tanggal 14 Mei 1987, di bawah komando Rabuka, para prajurit bersenjata memasuki ruangan parlemen dan menangkap PM Timoci Bavadra dan anggota kabinetnya, serta beberapa anggota parlemen lainnya.<sup>21</sup> Para saksi mata menyatakan, Bavadra dan kolega-koleganya diringkus dan dimasukkan ke dalam sebuah truk kemudian dibawa ke tempat yang belum diketahui. Pasukan Rabuka yang menutup mukanya dengan topeng pelindung dan bersenjatakan pistol memasuki gedung parlemen dan memerintahkan kepada segenap pejabat pemerintah agar mengikuti perintahnya. Tapi golongan oposisi diperbolehkan kembali ke kantornya yang letaknya bersebelahan dengan gedung pemerintahan,

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

kata para saksi mata. Bavadra adalah seorang keturunan Melanesia asli, tapi pemerintahan koalisinya didominasi oleh warga negara keturunan India.<sup>22</sup>

Dalam peristiwa kudeta tersebut, lebih dari 50 orang cedera Rabu ketika kelompok masyarakat Melanesia menyerang pertemuan warga keturunan India dalam tindak kekerasan paling buruk yang terjadi di Suva, Fiji, setelah kudeta militer 14 Mei lalu. Bentrokan itu terjadi ketika Gubernur Jenderal Sir Penaia Ganilau mengadakan pertemuan dengan dewan kepala-kepala suku guna memperoleh dukungan mereka bagi pembentukan suatu dewan penasehat serta usul-usul untuk mengubah konstitusi.

Menurut para saksi mata, kerusuhan terjadi sewaktu masyarakat Melanesia menyerang warga keturunan India yang tengah berkumpul di Taman Pusat Sukuna dan di sebuah stadion sepakbola dekat gedung parlemen. Di sepanjang jalan utama yang menghubungkan kedua tempat itu, warga Melanesia menghancurkan kaca-kaca mobil dan batu-batu beterbangan ke sana kemari. Setiap warga keturunan India yang ditemui dihajar dengan pukulan dan tendangan.

Warga keturunan India tampaknya tidak melakukan perlawanan. Untuk mengatasi situasi sekitar 40 prajurit dipanggil ke gedung parlemen. Perkelahian itu hanya berlangsung sekitar satu jam. Tadinya warga keturunan India itu bertemu dalam suatu rencana untuk mendengar penjelasan dari pemimpin mereka,

---

<sup>22</sup> Kedaulatan Rakyat, *Sepuluh Tentara Fiji Gagal Lakukan Kudeta, Edisi Jumat Pahing 15 Mei 1987 (17 Pasa 1919) Tahun XLII No. 224*, Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 1987, hlm. 1.

perdana menteri terguling Timochi Bavadra yang sudah dibebaskan Selasa malam setelah ditahan sejak kudeta 14 Mei lalu.

Kepada para wartawan, Bavadra menjelaskan Rabu bahwa ia harus menemui Gubernur Jenderal dan memberitahu sikapnya yang ikut dalam dewan penasehat yang rencananya akan dibentuk. Namun ia mundur dari komentar yang dikeluarkannya Selasa ketika ditanyakan tentang apakah ia tetap pada seruannya semula agar para pelaku kudeta diajukan ke pengadilan sebelum nantinya diberikan pengampunan.<sup>23</sup>

Ketika itu parlemen baru pertama kali bersidang, setelah kemenangan koalisi Partai Buruh Fiji (FLP), yang berprinsip pada ideologi sosialis, dan Partai Federasi Nasional (FNP) yang didukung oleh keturunan India, dalam pemilihan umum April 1987. Beberapa dari mereka yang ditahan, kemudian dilepaskan setelah diperiksa, namun PM Bavadra dan tiga kabinetnya tetap ditahan.

Keesokan harinya, Rabuka mengumumkan pembubaran parlemen dan berjanji akan membentuk kabinet sementara, yang akan dipimpinnya sendiri. Dalam pidatonya, yang disiarkan melalui Radio Fiji, Rabuka menyatakan bahwa tindakannya menggulingkan Pemerintahan Bavadra adalah untuk mencegah pertumpahan darah yang lebih besar antara dua kelompok ras utama, yaitu anak negeri Fiji dan keturunan India. Selain itu, ia juga akan menjamin supremasi anak negeri Fiji dalam masa mendatang.<sup>24</sup> Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan

---

<sup>23</sup> Kedaulatan Rakyat, *Kerusuhan di Suva Setelah Kudeta Fiji, Edisi Sabtu Kliwon 23 Mei 1987 (25 Pasa 1919) Tahun XLII No. 232*, Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 1987, hlm. 1.

<sup>24</sup> Zulkifli Hamid, *loc.cit.*

radio Fiji, Rabuka menjelaskan bahwa segenap anggota parlemen yang disekapnya berada dalam keadaan selamat.<sup>25</sup>

Sementara itu, PM Bavadra, yang disingkirkan dari kekuasaannya, menyerukan kepada pendukungnya untuk tetap menegakkan demokrasi, dengan cara mengembalikan kekuasaan pada pemerintah yang sah. Kepada negara-negara tetangganya, Australia dan Selandia Baru, Bavadra juga meminta agar dilakukan tindakan militer untuk mengakhiri aksi kudeta militer tersebut. Selandia Baru menanggapi dengan cara mengirimkan beberapa kapal perangnya ke wilayah perairan Fiji, namun tidak mendaratkan pasukan ke daratan Fiji. Kapal-kapal tersebut hanya membuat maneuver militer serta memantau perkembangan di Fiji dari jauh. Selanjutnya kedua negara besar di kawasan menerapkan sanksi ekonomi terhadap Fiji.

Peristiwa kudeta itu kelihatannya merupakan ekor dari kekerasan fisik antara anak negeri Fiji dengan keturunan India yang terjadi dua minggu sebelum berlangsungnya kudeta. Setiap hari jalan-jalan di Ibukota Suva dibanjiri oleh demonstrasi yang dilancarkan Gerakan Taukei (Gerakan Anak Negeri) pimpinan Apisai Tora, yang menuntut pembubaran kabinet koalisi FLP-NFP, yang didominasi oleh keturunan India. Demonstrasi serta pawai yang diselenggarakan mereka telah mengarah pada pertumpahan darah diantara pendukung demonstrasi yang sebagian besar adalah anak negeri Fiji, dengan para pendukung Bavadra, yang kebanyakan adalah orang-orang keturunan India.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Kedaulatan Rakyat, Tahun XLII No. 224, *loc.cit.*

<sup>26</sup> Zulkifli Hamid, 1996, *op.cit.*, hlm. 108-109.

Terlepas dari masalah keterlibatan AS dalam politik Fiji, kudeta militer yang dilaksanakan oleh Letkol Rabuka lebih banyak didorong oleh motivasi untuk mengembalikan kekuasaan politik ke anak negeri. Tindakan yang dilakukan oleh PM Bavadra dianggapnya telah membahayakan kepentingan anak negeri. Bahkan, barangkali, telah mencabik hak-hak anak negeri yang sudah terpelihara sejak ratusan tahun yang lalu, yaitu sejak *Deed of Ceston* yang ditandatangani oleh para kepala suku Fiji dengan pemerintah Inggris pada tahun 1874. Selain itu banyak indikasi lain yang membuktikan bahwa Rabuka berusaha memajukan kepentingan anak negeri. Antara lain misalnya, Rabuka sebagai penanggungjawab masalah keamanan dan ketertiban membiarkan Richard Naidu, seorang keturunan India yang menjadi jurubicara koalisi FLP-NFP, "dikeroyok" oleh kelompok Taukei, sekalipun ia telah melaporkan tindakan kelompok Taukei kepada pihak militer.

Rabuka justru kembali mengadakan kudeta kedua pada bulan September 1987, sebagai pernyataan ketidaksetujuannya terhadap pemerintahan sementara pimpinan Ratu Sir Kamisese Mara dan Gubernur Jenderal Ratu Sir Penaia Ganilau, ketika mereka akan membicarakan soal perubahan konstitusi dengan pimpinan koalisi FLP-NFP Bavadra. Dalam hal ini Rabuka mengatakan bahwa membicarakan soal konstitusi dengan pihak Bavadra adalah menjauhkan diri dari tujuan kudeta. Dalam hal itu, antara bulan September 1987 sampai Januari 1990, sebagai "orang kuat" dalam pemerintahan Fiji, Rabuka banyak mengeluarkan dekrit yang menguntungkan kaum anak negeri.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Zulkifli Hamid, *op.cit.*, hlm. 108-112.

Pemimpin kudeta militer Jumat lalu di Fiji, Kolonel Sitiveni Rabuka, pada tanggal 29 September 1987 memproklamkan Fiji sebagai negara republik. Ia mengatakan Undang-Undang Dasar negara itu ditinggalkan dan jabatan gubernur jenderal sebagai Wakil Ratu Inggris di Fiji sekarang tidak ada lagi.

Gubernur Jenderal Ratu Sir Penaia Ganilau tetap bersikeras bahwa ia adalah Kepala Negara Fiji. Pemerintah Inggris mengatakan, ia masih mengakui wewenang Gubernur Jenderal Ratu Sir Penaia Ganilau sebagai penguasa dan Wakil Ratu Elizabeth II di Fiji. Gubernur Jenderal Ratu Sir Penaia Ganilau bertemu dengan Kolonel Sitiveni Rabuka di Suva Selasa sementara kemacetan berlanjut dalam kemelut politik di negeri itu.

Kolonel Rabuka mengatakan kepada para diplomat asing Senin pagi, ia telah membatalkan konstitusi 1970 dan akan mengumumkan pembentukan satu dewan untuk memegang peranan pemerintah sementara. Kolonel Rabuka juga bertemu dengan para kepala badan-badan pemerintah dan diketahui sedang menyiapkan satu daftar yang memuat nama-nama yang mungkin jadi anggota dewannya di antara orang-orang tersebut.

Ia mengatakan melalui radio Fiji yang dikuasai militer Senin, ia tidak akan mengangkat seseorang politisi untuk jadi anggota dewan itu. Tujuh orang masih ditahan Selasa di bagian yang dijaga paling ketat di Penjara Naboro, termasuk Timochi Bavadra, perdana menteri pemerintah koalisi Partai Federasi Nasional Buruh yang digulingkan dalam kudeta 14 Mei pimpinan Rabuka.

Penerbit setempat Roberth Reid, dua pemimpin serikat buruh dan anggota-anggota senior koalisi Dr Bavadra juga ditahan di penjara itu. Sedikitnya 15 orang



ditangkap serdadu-serdadu Fiji ketika Kolonel Rabuka melancarkan perampasan kekuasaan Jumat lalu.

Pemimpin Partai Aliansi Ratu Sir Kamisese Mara, anggota pemerintah sementara gubernur jenderal, diketahui Selasa berada di kantornya di Kementerian Luar Negeri tapi stafnya memberitahu AFP ia tidak mau berbicara kepada pers. Kolonel Rabuka mengklaim dukungan dari sedikitnya 10 kepala desa yang mengiriminya pesan yang mendukung tindakannya, tapi kepala-kepala regional yang jauh lebih kuat, yang menjadi Dewan Agung, belum menyatakan sikap mereka. Bank-bank dibuka lagi Selasa setelah ditutup hari Senin atas perintah Kolonel Rabuka. Dua surat kabar harian di negeri itu masih tutup, meski penerbit *Fiji Sun* Carney dibebaskan dari penjara Naboro, Senin.<sup>28</sup>

Pada akhirnya, Fiji memproklamkan menjadi negara republik pada tanggal 7 Oktober 1987. Pada tanggal 16 Oktober, Ganilau kembali diangkat menjadi gubernur jenderal. Dengan terjadi peristiwa itu, maka secara resmi putuslah ikatan antara Fiji dan Inggris yang telah berlangsung selama 113 tahun.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Kedaulatan Rakyat, *Rabuka Proklamirkan Fiji Jadi Republik, Edisi Rabu Kliwon 30 September 1987 (6 Sapar 1920) Tahun XLIII No. 4*, Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 1987, hlm. 10.

<sup>29</sup> Et Al, *Ensiklopedia Indonesia Edisi Khusus Suplemen*, Jakarta: Uitgeverij W. Van Hoeve B. V., 1986, hlm. 193-194.